



**Judul** : DPR Jangan Sia-siakan Kesempatan Angket  
**Tanggal** : Selasa, 12 Maret 2024  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 1

# DPR Jangan Sia-siakan Kesempatan Angket

*Dorongan para tokoh ialah bentuk ketaatan masyarakat sipil terhadap konstitusi sekaligus kepercayaan kepada parpol sebagai perwakilan di parlemen.*

**YAKUB PRYATAMA WIJAYAATMAJA**  
[yakub.p@mediaindonesia.com](mailto:yakub.p@mediaindonesia.com)

**D**ESAKAN dari para tokoh dan masyarakat agar DPR mewujudkan hak angket menambah kepercayaan diri sejumlah partai politik (parpol). Dukungan itu juga kian menegaskan hak angket memang mesti segera digerakkan.

Sebelumnya, diberitakan sebanyak 50 tokoh masyarakat, mulai akademisi, aktivis antikorupsi, hingga seniman, menyurati pimpinan parpol untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Mereka yang disebut dalam surat itu ialah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Partai NasDem Surya Paloh, Ketua PKB Muhaimin Iskandar, Pre-

siden PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketua PPP Muhammad Mardiono.

Dalam surat yang diterbitkan Jumat (8/3) tersebut, para tokoh menilai hak angket di DPR penting segera diwujudkan untuk merespons keresahan masyarakat serta mencegah pembangkangan sipil pada institusi kekuasaan.

Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menyebut dorongan dari berbagai elemen masyarakat itu menambah kepercayaan diri parpol. "Kami mengapresiasi dorongan itu. Tentu ini bagian dari banyaknya gelombang protes, kritik dari masyarakat terhadap Pemilu 2024 secara keseluruhan," kata Chico, kemarin.

Menurutnya, hak angket bisa saja digulirkan setelah

## Perjalanan Pengajuan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

### 19 Februari

Calon wakil presiden no urut 3 Ganjar Pranowo mendorong dua partai pengusungnya, yakni PDIP dan PPP, menggunakan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu Presiden 2024.

### 22 Februari

PKB, PKS, dan NasDem siap ikut langkah PDIP gulirkan hak angket di DPR.

### 25 Februari

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat Nusantara mendorong PDIP, NasDem, PKB, dan PKS untuk segera mengajukan hak angket di DPR.

### 27 Februari

Gerakan Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) mendorong 30 anggota DPR segera menggulirkan hak angket.

### 5 Maret

Rapat paripurna pembukaan masa persidangan IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diwarnai interupsi terkait dengan penggunaan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

### 8 Maret

Sebanyak 50 aktivis menyurati lima ketua umum partai politik agar mengusung hak angket untuk melakukan penyelidikan kecurangan Pemilu 2024.

Sumber: Litbang MI

pengumuman resmi rekapitulasi suara oleh KPU pada 20 Maret 2024. "Kami mempersiapkan dengan matang, semoga dengan dukungan masyarakat bisa berjalan lancar dan partai-partai lain mendukung untuk digulirkan," ucapnya.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengemukakan pihaknya juga mendukung penuh dorongan 50 tokoh tersebut. Ia

menegaskan hak angket memang mesti segera digerakkan. "Mesti segera digulirkan. Berbarengan bisa dibangun komunikasi antarpol pendukung 1 dan 3," ungkap Mardani.

Ia juga meminta seluruh parpol pendukung 1 ataupun 3 untuk menggulirkan dulu hak angket dan mengumpulkan bukti kecurangan sembari jalan. "Gulirkan dulu hak angket sambil jalan dilengkapi,"

kata Mardani.

Senada, anggota Bidang Riset dan Kajian Timnas Amin, Anang Zubaidy, membeberkan DPR jangan sampai menyalahgunakan kesempatan menggulirkan hak angket. "Dorongan masyarakat kepada parpol didasari karena masyarakat ingin DPR melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya."

## Dukungan moral

Peneliti Pusat Penelitian Politik BRIN Wasisto Raharjo Jati juga menyebut surat desakan dari 50 tokoh itu merupakan bagian dari dukungan moral agar para parpol yang memiliki inisiatif hak angket lebih terpacu menggulirkannya di DPR. Dukungan itu sekaligus bentuk ketaatan masyarakat sipil terhadap konstitusi dan kepercayaan terhadap parpol sebagai perwakilan masyarakat di parlemen. "Saya pikir berbagai tokoh masyarakat sipil tahu dan taat konstitusi bahwa hanya parpol yang punya kursi DPR, itu dapat menggulirkan hak angket," imbuhnya.

Dilain pihak, anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspari Gaus menilai hak konstitusional legislator itu baru sekadar kembang didengarkan. Ia mengatakan syarat hak angket tertuang pada UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. "Itu mekanismenya. Jadi, enggak perlu diteriakkan atau disuarakan, tapi ikuti mekanisme." (Mal/Ind/Fah/X-3)